

EVALUASI SAMPEL KIRIMAN DINAS TAHUN 2007 – 2010

MARIA FATIMA PALUPI DAN YANTI HERYANTI

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, Gunungsindur-Bogor 16340

ABSTRAK

Telah dilakukan evaluasi terhadap sampel obat hewan kiriman dinas tahun 2007 – 2010 di Balai Besar Pengujian Mutu Obat Hewan (BBPM SOH) dalam rangka pengawasan mutu obat hewan yang beredar. Berdasarkan jumlah pengirim sampel pada tahun 2007 terdapat 14 dinas, tahun 2008 ada 9 (sembilan) dinas, tahun 2009 sebanyak 10 (sepuluh) dinas dan tahun 2010 sebanyak 11 (sebelas) dinas yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan jenis sampel, selama tahun 2007 hingga 2010 jenis sampel antibiotik/antibakteria merupakan jenis sampel terbanyak yang dikirimkan yaitu 53,86 % sedangkan vaksin hanya mencapai 2,21% dari total sampel selama 4 (empat) tahun. Obat hewan produksi dalam negeri mencapai rata-rata 98,28% dari total sampel yang dikirimkan. Dari hasil pengujian, jumlah dan jenis sampel obat hewan kiriman dinas yang hasil ujinya tidak memenuhi syarat semakin meningkat yaitu pada tahun 2007 jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat adalah 1,34% sedangkan pada tahun 2010 menjadi 7,30% dari total sampel per tahun.

Kata Kunci: evaluasi, kiriman dinas, obat hewan

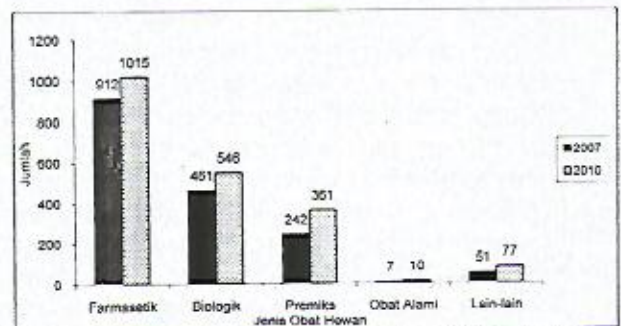
ABSTRACT

The evaluation of quality veterinary drug samples from provincial/city livestock services submissions from 2007 to 2010 to National Veterinary Drug Assay Laboratory (NVDAL) has been done. The purpose of this evaluation was to control the quality of veterinary drugs being distributed in provinces. Based on the origin of livestock services, from 2007 – 2010 there are 14 (2007), 9 (2008), 10 (2009), and 11 (2010) had been submitted veterinary drugs to NVDAL. Based on the category of samples, during 2007-2010, antibiotics/antibacterias were the highest samples or 53,86%, meanwhile the number of vaccines samples only 2,21% from total samples for 4 (four) years. Local production reach an average 98,28% from total samples that had been submitted to NVDAL. The numbers and kinds of samples that did not passed the assay during 2007 until 2010 were increased.

Keywords: evaluation, provincial livestock services, veterinary drugs

PENDAHULUAN

Obat hewan di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah obat hewan yang telah mendapatkan nomor registrasi, dimana dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2010 secara keseluruhan terjadi peningkatan 20,08%. Pada tahun 2007 jumlah obat hewan yang terdaftar adalah 1673 nama dagang sedangkan pada tahun 2010 jumlah obat hewan yang telah terdaftar adalah 2009 nama dagang (1,2). Dalam kurun waktu tersebut obat hewan kategori farmasetik meningkat 11,29%, golongan biologik meningkat 18,44%, premiks meningkat 49,17%, obat alami meningkat 42,86% sedangkan sediaan obat hewan kategori lainnya seperti shampo antiseptik, diluen vaksin meningkat 50,98%. Data peningkatan obat hewan berdasarkan kategori obat hewan dapat diterangkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Jumlah Obat Hewan Tahun 2007 dan Tahun 2010 Berdasarkan Kategori Obat Hewan

Dari Gambar 1. dapat dilihat bahwa jenis obat farmasetik merupakan obat hewan yang paling banyak diregistrasikan. Dari jenis obat farmasetik tersebut, pada tahun 2010 obat hewan jenis antibiotik/antibakteria yang paling banyak diregistrasi, yaitu mencapai 492 nama dagang. Sedangkan dari jenis biologik, vaksin unggas merupakan obat hewan produk biologik yang paling banyak diregistrasi, yaitu mencapai 475 nama dagang (2).

Sejalan dengan peningkatan jumlah obat hewan yang telah mendapat izin beredar maka diharapkan terjadi

peningkatan pengawasan terhadap obat hewan yang beredar. Petugas yang melakukan pengawasan obat hewan adalah Pengawas Obat Hewan. Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 74/Permentan/OT.140/12/2007 pengawas obat hewan adalah pegawai negeri sipil berijazah dokter hewan yang diberi tugas dan kewenangan melakukan pengawasan obat hewan. Pengawas obat hewan terdiri dari pengawas obat hewan pusat, pengawas obat hewan provinsi dan pengawas obat hewan kotamadya/ kabupaten.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tersebut, maka pihak dinas maupun pusat yang membawahi permasalahan obat hewan melakukan pengujian mutu obat hewan yang beredar dengan mengirimkan sampel obat hewan ke BBPMSOH. Sampel obat hewan kategori ini dimasukkan dalam kategori sampel Kiriman Dinas (KD).

METODOLOGI

Materi yang digunakan adalah data sampel Kiriman Dinas tahun 2007 – 2010. Evaluasi yang dilakukan dibatasi hanya pada sampel Kiriman Dinas yang berupa obat hewan, sedangkan Kiriman Dinas berupa pakan dan vaksin rabies untuk manusia tidak dibahas dalam makalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas atau Instansi Pengirim Sampel

Salah satu tujuan pengawasan obat hewan adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan mutu atau kualitas obat hewan (4). Oleh sebab itu, untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan mutu obat hewan yang beredar maka pengawas obat hewan melakukan pengambilan sampel obat hewan di *Poultry Shop* ataupun depo obat hewan dan mengirimkan ke BBPMSOH untuk diuji mutunya. Pada tahun 2007 terdapat 14 dinas yang mengirimkan sampel obat hewan, tahun 2008 ada 9 (sembilan) dinas, tahun 2009 sebanyak 10 (sepuluh) dinas dan tahun 2010 sebanyak 11 (sebelas) dinas. Data lengkap dinas peternakan propinsi/ kabupaten/ kotamadya yang mengirimkan sampel sepanjang tahun 2007 – 2010 terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Dinas Pengirim Sampel Kiriman Dinas Tahun 2007 - 2010

Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
1. Prov. DIY	1. Prov. DIY	1. Prov. DIY	1. Prov. DIY
2. Prov. Sulawesi Selatan	2. Prov. Sulawesi Selatan	2. Prov. Sulawesi Selatan	2. Prov. Sulawesi Selatan
3. Prov. Jawa Timur	3. Kab. Malang	3. Prov. Jawa Tengah	3. Prov. Jawa Tengah
4. Prov. Sumatera Selatan	4. Prov. Bengkulu	4. Prov. Bali	4. Prov. Papua
5. Prov. Lampung	5. Prov. Bali	5. Prov. Kalimantan Timur	5. Prov. Kalimantan Barat
6. Kab. Manokwari	6. Prov. Jambi	6. Kab. Sragen	6. Prov. Jawa Timur
7. Prov. NTB	7. Prov. Kal. Timur	7. Prov. Jawa Timur	7. Prov. Sumatera Utara
8. Prov. Bali	8. Prov. Papua	8. Prov. Banten	8. DKI Jakarta
9. Kab. Malang	9. Prov. Jawa Tengah	9. Prov. Bangka Belitung	9. Prov. Jawa Barat
10. Kab. Bengkulu		10. Prov. Papua	10. Prov. Kal. Timur
11. Prov. Sumatera Barat			11. Kab. Malang
12. Prov. Jambi			
13. Prov. Jawa Barat			
14. Kab. Bogor			

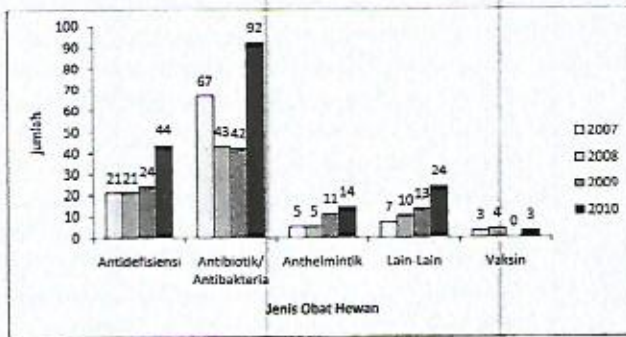
Dari Tabel 1. dapat dilihat bahwa dari tahun 2007 – 2010 Dinas Peternakan Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, Papua dan Kabupaten Malang relatif rutin mengirimkan sampel obat hewan ke BBPMSOH untuk diuji mutunya. Dilihat dari data tersebut maka dari 32 dinas peternakan propinsi yang tercantum dalam Indeks Obat Hewan Indonesia (IOHI) 2010, maka hanya 30% yang melakukan pengawasan mutu obat hewan dengan mengirimkan sampel ke BBPMSOH. Dinas peternakan propinsi yang rutin melakukan pengawasan mutu adalah propinsi yang memiliki populasi ternak yang tinggi (3).

Jumlah, Jenis dan Hasil Uji Sampel Kiriman Dinas

Jumlah sampel Kiriman Dinas yang dikirimkan dari tahun 2007 – 2010 cukup bervariasi, dimana pada tahun 2007 ada 103 sampel, terjadi penurunan pada tahun 2008 menjadi 83 sampel, naik menjadi 90 sampel pada tahun 2009 dan terus meningkat menjadi 177 sampel di tahun 2010. Hal ini tentu saja belum cukup ideal berdasarkan jumlah obat yang beredar untuk melakukan pengawasan obat hewan di daerah, dimana sesuai yang telah diuraikan di atas bahwa jumlah obat hewan yang memiliki ijin untuk diperdagangkan di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 2009 nama dagang.

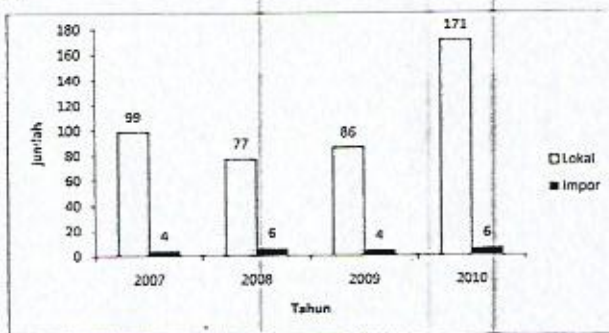
Pada Gambar. 2 dapat dilihat berbagai jenis kategori obat hewan yang berasal dari Kiriman Dinas dan dapat dilihat bahwa antibiotika/ antibakteria merupakan sampel paling banyak dikirimkan. Hal ini sesuai dengan data bahwa obat farmasetika golongan antibiotika/ antibakteria merupakan obat hewan yang paling banyak diregistrasikan. Pada tahun 2007 golongan antibiotika/ antibakteria mencapai 65,09% dari total sampel kiriman dinas obat hewan, tahun 2008 mencapai 51,81%, tahun 2009 terdapat 46,67%, dan tahun 2010 jenis obat hewan ini mencapai 51,58% dari total sampel. Sedangkan dari produk biologik jenis sampel yang dikirimkan adalah vaksin. Total sampel vaksin dari tahun 2007 – 2010 yang dikirimkan oleh dinas sebanyak 10 (sepuluh) sampel atau setara dengan 2,21%

dari total sampel KD selama 4 (empat) tahun. Hal ini tentu kurang seimbang dengan jumlah jenis vaksin yang diregistrasi dimana pada tahun 2010 jenis vaksin yang diregistrasi mencapai 535 nama dagang (2) atau setara dengan 26,30 % dari total obat hewan yang telah mendapat nomor registrasi. Data lain-lain pada Gambar 2. Merupakan jenis obat hewan selain antibiotika/ antibakteria, anthelmintika, antidefisiensi dan vaksin.



Gambar. 2 Jumlah dan Jenis Obat Hewan Kiriman Dinas Tahun 2007 - 2010

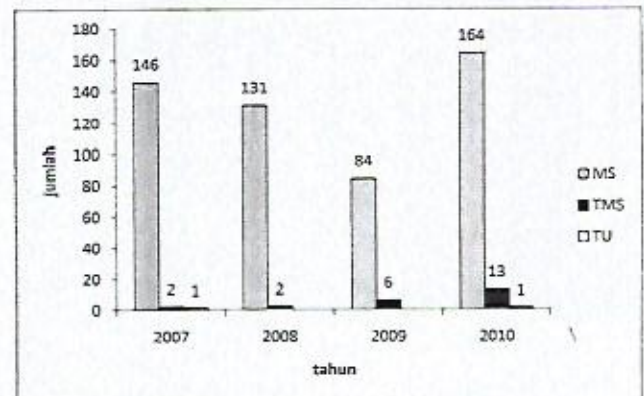
Berdasarkan jenis produsen, mayoritas obat hewan Kiriman Dinas yang dikirimkan ke BBPMSOH merupakan produksi dalam negeri. Pada tahun 2007 obat hewan Kiriman Dinas produk dalam negeri adalah 96,12%, tahun 2008 mencapai 92,77 %, tahun 2009 terdapat 95,56%, sedangkan tahun 2010 meningkat menjadi 96,67% dari total sampel Kiriman Dinas. Menurut data Sub Direktorat Pengawas Obat Hewan (Sub Dit POH), pada tahun 2010 jumlah importir dan distributor obat hewan impor lebih banyak dibandingkan dengan produsen lokal. Lebih lanjut, sampel obat hewan Kiriman Dinas untuk produksi lokal, rata-rata 25% dari total sampel pertahunnya berasal dari 1 (satu) produsen. Ini tentu tidak seimbang dimana jumlah produsen obat hewan lokal pada tahun 2010 mencapai 88 produsen. Data lengkap sampel obat hewan kiriman dinas berdasar produksi lokal dan impor terdapat dalam Gambar. 3.



Gambar 3. Jumlah Obat Hewan Kiriman Dinas Berdasar Produksi Lokal dan Impor

Ketidakseimbangan antara jumlah sampel obat hewan Kiriman Dinas dengan jumlah obat hewan yang beredar disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain: pengambilan sampel mayoritas dilakukan di *Poultry Shop* atau Depo sehingga keragaman obatnya cenderung kurang bervariasi, pengambilan sampel obat hewan sebaiknya juga dilakukan di peternak karena banyak produsen yang langsung menjual produknya ke peternak. Faktor lain adalah harga vaksin relatif lebih mahal dibandingkan dengan produk farmasetik termasuk biaya pengujiannya. Produk lokal lebih mudah ditemukan di *Poultry Shop* atau Depo. Tidak adanya distributor untuk obat hewan impor ataupun lokal di wilayah tertentu yang akan berakibat pada kurangnya variasi jenis ataupun produsen obat hewan dan belum atau tidak adanya pengawas obat hewan di daerah sehingga pengawasan kurang berjalan dengan maksimal.

Dari hasil pengujian kiriman dinas persentase jumlah obat hewan yang tidak memenuhi syarat (TMS) meningkat. Pada tahun 2007 - 2010 jumlah yang tidak memenuhi syarat secara berturut-turut adalah sebagai berikut 1,94%, 2,41%, 6,67%, 6,78% dari total sampel obat hewan. Data mengenai hasil uji obat hewan kiriman dinas dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Hasil Uji Obat Hewan Kiriman Dinas Tahun 2007 - 2010 (MS = Memenuhi Syarat, TMS = Tidak Memenuhi Syarat, TU = Tidak Uji)

Jenis obat hewan kiriman dinas yang hasil ujinya tidak memenuhi syarat cukup bervariasi. Pada tahun 2007 sampel yang tidak memenuhi syarat adalah antibiotik dan antidefisiensi vitamin. Sampel obat hewan kiriman dinas tahun 2008 yang tidak memenuhi syarat adalah antidefisiensi vitamin dan premiks yang mengandung antibiotik *growth promotor*. Tahun 2009, sampel yang hasil ujinya tidak memenuhi syarat adalah premiks yang mengandung *growth promotor*, antidefisiensi vitamin, antibiotik/ antibakteria dan anthelmintik. Pada tahun 2010, jenis sampel yang tidak lulus semakin bervariasi yaitu

desinfektan, antidefisiensi vitamin, antibiotik/ antibakteria, anthelmintika, antikoksidia dan premiks yang mengandung antibiotik *growth promotor*. Melihat kecenderungan peningkatan jumlah obat hewan di lapangan yang tidak memenuhi syarat, maka pengawasan terhadap obat hewan yang beredar harus semakin ditingkatkan.

KESIMPULAN

Dilihat dari meningkatnya jumlah sampel Kiriman Dinas untuk diuji mutunya di BBPMSOH menunjukkan adanya peningkatan dalam pengawasan mutu obat hewan yang beredar di tiap-tiap propinsi di Indonesia. Namun, variasi jenis dan jumlah sampel yang dikirimkan perlu ditingkatkan sejalan dengan jumlah obat hewan yang telah mendapat ijin untuk beredar. Lebih lanjut, fungsi dan peranan pengawas obat hewan di daerah maupun di pusat harus senantiasa ditingkatkan agar dapat memberikan jaminan kepada pengguna bahwa mutu obat yang beredar benar-benar diawasi oleh pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh dinas yang telah menjalankan fungsi dan tugas pengawasan obat hewan dengan baik demi mewujudkan jaminan mutu obat hewan yang beredar.

REFERENSI

1. **Anonim**, 2007, Indeks Obat Hewan Indonesia (IOHI), Edisi VI, Direktorat Jenderal Peternakan – Departemen Pertanian RI dengan Asosiasi Obat Hewan Indonesia. ASOHI. Jakarta.
2. **Anonim**, 2010, Indeks Obat Hewan Indonesia (IOHI), Edisi VI, Direktorat Jenderal Peternakan – Departemen Pertanian RI dengan Asosiasi Obat Hewan Indonesia. ASOHI. Jakarta.
3. **Anonim**, 2008, Statistik Peternakan 2008, Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian RI. Jakarta.
4. **Dirkeswan**, 2006, Buku Saku Pengawas Obat Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan – Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.
5. **Peraturan Menteri Pertanian No. 74/Permentan/OT.140/12/2007**: Tentang Pengawasan Obat Hewan.